BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap keamanannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Permerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyrakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
9. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
10. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
11. Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
12. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
13. Terbatas adalah arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan.
14. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
15. Rahasia adalah arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila Informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy,* keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
16. Sangat Rahasia adalah arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
17. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
18. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

19. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
20. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
21. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
   a. mendorong Perangkat Daerah agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
   b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
   c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
   d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
   a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
   b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
   c. tersedianya informasi dilingkungan Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
   d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
   e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mencakup:

a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

BAB IV
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES
Bagian Kesatu
Klasifikasi Keamanan
Pasal 4

(1) Arsip dinamis yang tercipta dilingkungan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 4 (empat) kategori keamanan yang meliputi:
    a. biasa/umum/terbuka;
    b. terbatas;
    c. rahasia; dan
    d. sangat rahasia.
(2) Biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah arsip yang memiliki informasi manakala dibuka untuk publik tidak merugikan siapapun.
(3) Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
(4) Rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
(5) Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

Pasal 5

Arsip dinamis dilingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk kedalam katagori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat menganggu kinerja Perangkat Daerah, yang meliputi:

a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Rekam Medis Pegawai;
b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang;
c. arsip dimanis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran disetiap Unit Kerja; dan
e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti Daftar Arsip Vital dan Daftar Arsip Terjaga.

Pasal 6

Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk kedalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Perangkat Daerah yang meliputi:
a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Personal File;
b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaiatan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan, dan instalasi listrik/telepon;
c. arsip yang tercipta terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
f. arsip yang terkait dengan isi akta outentik yang terakhir maupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
h. arsip yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama; dan
i. Daftar Arsip Rahasia.

Bagian Kedua
Hak Akses
Pasal 7

(1) Arsip dinamis yang tercipta dilingkungan Pemerintah Daerah terbagi menjadi 2 (dua) katagori hak akses yang meliputi:
    a. pengguna internal yaitu penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas internal; dan
    b. pengguna eksternal yaitu publik, pengawas eksternal, dan aparat penegak hukum.

(2) Setiap pegawai Pemerintah Daerah hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya.
(3) Publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang dikatagorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB V
PENGAMANAN ARSIP DINAMIS
Pasal 8

(1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas/*Closed Circuit Television* (*CCTV*), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
(2) Pengamanan arsip katagori umum disimpan pada rak besi, arsip katagori terbatas disimpan pada *filling cabinet*, dan arsip katagori rahasia disimpan pada lemari besi.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 9

(1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan atau pengelola arsip.
(2) Arsiparis/Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.

Pasal 10

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan, pelayanan, dan pengamanan serta penentuan hak akses arsip dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KLASIFIKASI DAN PENGATURAN AKSES ARSIP
Pasal 11

(1) Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantive disusun dalam bentuk system klasifikasi;
(2) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN/PENDANAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DAFTAR KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
KODE KLASIFIKASI				URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000				UMUM					
	000.1			KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.1		Telekomunikasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.2		Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah					
			000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD					
			000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai					
		000.1.3		Perjalanan Dinas Luar Negeri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Terbatas	Internal (Es.	Terbatas	Terganggunya	Sub Bagian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah		Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DAFTAR KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KLASIFIKASI					SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
KODE KLASIFIKASI				URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000				UMUM					
	000.1			KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.1		Telekomunikasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.2		Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah					
			000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD					
			000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai					
		000.1.3		Perjalanan Dinas Luar Negeri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Terbatas	Internal (Es.	Terbatas	Terganggunya	Sub Bagian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.4		Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)	Terbuka/Biasa	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.5		Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.6		Penyediaan Konsumsi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.7		Pengurusan Kendaraan Dinas	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas					
			000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan					
			000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan					
		000.1.8		Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	Terbuka/Biasa	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape					
			000.1.8.2	Penghijauan					
			000.1.8.3	Perbaikan Gedung					
			000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor					
			000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma					
			000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman					
		000.1.9		Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									masing-masing OPD
			000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan					
			000.1.9.2	Pemasangan					
		000.1.10		Ketertiban dan Keamanan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
			000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas					
			000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan					
		000.1.11		Administrasi Pengelolaan Parkir	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
		000.1.12		Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD
	000.2			PERLENGKAPAN	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bagian Perlengkapan, Asisten Administrasi Umum
		000.2.1		Inventarisasi dan Penyimpanan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bagian Perlengkapan, Asisten Administrasi Umum
			000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan					
			000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan					
		000.2.2		Pemeliharaan peralatan kantor	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bagian Perlengkapan, Asisten Administrasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	Umum
			000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor					
			000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor					
		000.2.3		Distribusi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bagian Perlengkapan, Asisten Administrasi Umum
			000.2.3.1	Barang habis pakai	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bagian Perlengkapan, Asisten Administrasi Umum
			000.2.3.2	Barang milik daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bagian Perlengkapan, Asisten Administrasi Umum
		000.2.4		Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	BPKAD
		000.2.5		Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	BPKAD
	000.3			PENGADAAN					
		000.3.1		Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	ULP Asisten Ekonomi dan Pembanguan
		000.3.2		Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	ULP Asisten Ekonomi dan Pembanguan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		000.3.3		Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	ULP Asisten Ekonomi dan Pembanguan
		000.3.4		Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	ULP Asisten Ekonomi dan Pembanguan
		000.3.5		Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	ULP Asisten Ekonomi dan Pembanguan
		000.3.6		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	ULP Asisten Ekonomi dan Pembanguan
	000.4			PERPUSTAKAAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.1		Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.2		Deposit Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.3		Koleksi Pustaka	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.3.1	Pembelian	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.3.2	Hibah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.3.3	Hadiah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
			000.4.3.4	Tukar Menukar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.3.6	Terbitan Internal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.4		Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.6		Layanan Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Kearsipan dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Perpustakaan
			000.4.6.1	Keanggotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.6.2	Peminjaman	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.6.3	Pengembangan gemar baca	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.7		Kerjasama Perpustakaan	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.7.1	MoU	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.8.1	Pengembangan situs web	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.10		Konservasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
		000.4.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.12		Transformasi Digital	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.13		Kurasi Digital	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.4.14		Pengembangan Perpustakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.14.1	Perpustakaan Umum	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kearsipan dan Perpustakaan
	000.5			KEARSIPAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.2		Pembinaan Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.3	Penilaian Arsiparis	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.5	Data Base Arsiparis	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.3		Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.4		Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.5		Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.6		Penyusutan Arsip					
			000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.7		Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.9		Pengelolaan Arsip Statis	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.9.7	Preservasi Kuratif	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
			000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.10		Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.11		Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.14		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		000.5.15		Pengawasan Kearsipan	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	Rahasia	Terbuka untuk	Rahasia	Terganggunya	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						eselon II dan APH		ketahanan bangsa dan negara	Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			000.5.15.3	Sanksi	Rahasia	Terbuka untuk eselon II dan APH	Rahasia	Terganggunya ketahanan bangsa dan negara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	000.6			PERSANDIAN	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
		000.6.1		Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
		000.6.2		Pengamanan persandian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
		000.6.3		Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	Terbatas	Internal (Es.	Tertutup	Memiliki dampak	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.3.3	Pelaksanaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.3.4	Pelaporan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
		000.6.4		Pembinaan dan Pengendalian Persandian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.4.2	Jaring Komunikasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
		000.6.5		Layanan Sertifikasi Elektronik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	Terbatas	Internal (Es.	Tertutup	Memiliki dampak	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			000.6.5.7	Pelaporan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
	000.7			PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bappeda, Sub Bagian Perencanaan di masing-masing OPD
		000.7.1		Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Rendalev

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
			000.7.1.2	Musrenbang Nasional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.1.6	Musrenbang Desa	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
		000.7.2		Perencanaan Pembangungan Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Rendalev

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.2.6	Program kerja tahunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	Terbatas	Internal	Tertutup	Memiliki dampak	SDA
			000.7.2.8	Laporan Berkala	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
			000.7.2.9	Laporan Insidential	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	PPM
			000.7.2.10	Evaluasi Program	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
		000.7.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	PPM
		000.7.4		Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
		000.7.5		Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
		000.7.6		Aksi Strategis Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Rendalev

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			000.7.6.5	Penerapan perencaan aksi strategi daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
		000.7.7		Perencanaan Pendanaan Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Rendalev
			000.7.7.2	Pendanaan Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Rendalev
			000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Rendalev
			000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	Rahasia	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Tertutup	Terganggunya ketahanan bangsa dan Negara	Rendalev
			000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Rahasia	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Tertutup	Terganggunya Ketahanan bangsa dan Negara	Rendalev
	000.8			ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Bagian Organisasi Setda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
		000.8.1		Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Setda
			000.8.1.1	Pembentukan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Setda
			000.8.1.2	Pengubahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Setda
			000.8.1.3	Pembubaran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Umum
		000.8.2		Uraian Jabatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
			000.8.2.1	Analisa Jabatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
			000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
		000.8.3		Ketatalaksanaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			000.8.3.1	Proses Bisnis	Terbatas	Internal	Tertutup	Memiliki dampak	Sekretariat
			000.8.3.2	Standar Pelayanan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
			000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	Terbatas	Internal	Tertutup	Tidak memiliki dampak	Sekretariat
			000.8.3.4	Pelayanan Publik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
		000.8.4		Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
		000.8.5		Evaluasi Kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
		000.8.6		Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
			000.8.6.1	Budaya Kerja	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
			000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Eselon II dan APH	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat
	000.9			PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bagian Litbang Bappeda
		000.9.1		Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
		000.9.2		Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
		000.9.3		Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
		000.9.4		Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
		000.9.5		Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
		000.9.6		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
			000.9.6.1	Data	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
			000.9.6.2	Statistik	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
			000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
		000.9.7		Master proceeding/ jurnal penelitian,	Terbuka	Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki	Litbang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		Eksternal		dampak	
		000.9.8		Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Internal	Tertutup	Memiliti dampak	Litbang
		000.9.9		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampajk	Litbang
		000.9.10		Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	Terbuka	Internal dan Ekternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Litbang
100				PEMERINTAHAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bagian Pemerintahan pada Asisten Pemerintahan Kesra
	100.1			OTONOMI DAERAH	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.1.1		Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.1.2		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.1.3		Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.1.4		Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Rahasia	Aparat Hukum	Tertutup	Memiliki dampak	Bid.PPM
			100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Rahasia	Aparat Hukum	Tertutup	Memiliki dampak	Bid.PPM
			100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rahasia	Aparat Hukum	Tertutup	Memiliki dampak	Bid.PPM
			100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.1.4.5	Assosiasi Daerah	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.1.5		Otonomi khusus dan daerah istimewa	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.1.6		Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Terbuka	Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki	Bid.PPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah		Eksternal		dampak	
			100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbuka	Internal dan EksternalEksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbuka	Internal dan Ekternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.1.7		LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Terbuka	Internal dan Ekternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Rendalev
	100.2			PEMERINTAHAN UMUM	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bagian Pemerintahan pada Asisten Pemerintahan Kesra
		100.2.1		Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.2.2		Dekonsentrasi dan Kerjasama	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid,PPM
			100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
		100.2.3		Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	Terbuka	Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak	Bid.PPM
			100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	Terbatas	Eselon II, III dan APH	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bid.PPM
			100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	Terbatas	Eselon II, III dan APH	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Bid.PPM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Terbatas	Eselon II, III dan APH	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bid.PPM
			100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon II, III dan APH	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bid.PPM
	100.3			HUKUM	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bagian Hukum pada Asisten Pemerintahan Kesra
		100.3.1		Program Legislasi					
			100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah					
			100.3.1.2	Program Legislasi					
		100.3.2		Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan					
		100.3.3		Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah					
			100.3.3.1	Keputusan / Ketetapan Gubernur					
			100.3.3.2	Keputusan / Ketetapan Bupati					
			100.3.3.3	Keputusan / Ketetapan Walikota					
			100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi					
			100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten					
			100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota					
		100.3.4		Instruksi / Surat Edaran					
			100.3.4.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi					
			100.3.4.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten					
			100.3.4.3	Instruksi / Surat Edaran Kota					
			100.3.4.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II					
		100.3.5		Surat Perintah					
			100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur					
			100.3.5.2	Surat Perintah Bupati					
			100.3.5.3	Surat Perintah Walikota					
			100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II					
		100.3.6		Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis					
		100.3.7		Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama					
			100.3.7.1	Dalam Negeri					
			100.3.7.2	Luar Negeri					
		100.3.8		Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)					
		100.3.9		Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum					
		100.3.10		Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)					
		100.3.11		Kasus/ Sengketa Hukum	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Bagian Hukum Asisten Pemerintahan dan Kesra
			100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran					
			100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata					
			100.3.11.3	Tata Usaha Negara					
			100.3.11.4	Perburuhan					
			100.3.11.5	Arbitrase					
			100.3.11.6	Sengketa Adat					
		100.3.12		Perijinan					
		100.3.13		Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindag
			100.3.13.1	Hak Cipta					
			100.3.13.2	Hak Paten					
			100.3.13.3	Hak Desain Industri					
			100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang					
			100.3.13.5	Hak Merk					
		100.3.14		Permohonan HAKI yang ditolak					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200				POLITIK					
	200.1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		200.1.1		Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		200.1.2		Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten nganjuk
			200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten nganjuk
			200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten nganjuk
			200.1.2.3	Bela Negara	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten nganjuk
			200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten nganjuk
			200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Badan Kesatuan Bangsa dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan negara	Politik Kabupaten nganjuk
		200.1.3		Kewaspadaan Nasional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten nganjuk
			200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		200.1.4		Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200.1.4.1	Ketahanan Seni	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.2	Ketahanan Budaya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.6	Fasilitasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan negara	Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		200.1.5		Politik Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat	Badan Kesatuan Bangsa dan
			200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan negara	Kabupaten Nganjuk
			200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.5.6	Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.5.7	Database Parpol	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			200.1.5.9	Pemilihan Umum	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Apa.rat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	KPU
		200.1.6		Ketahanan Ekonomi					
			200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian					
			200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter					
			200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat					
			200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi					
	200.2			PEMILU	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesra, KPU
		200.2.1		Kebijakan di bidang Pemilu yang					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		200.2.2		Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih					
			200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu					
			200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)					
			200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan					
			200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)					
			200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)					
		200.2.3		Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu					
			200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik					
			200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik					
			200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan					
			200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual					
		200.2.4		Penetapan Peserta Pemilu					
			200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota					
			200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR					
			200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR					
			200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota					
			200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan					
		200.2.5		Pencalonan Pemilu					
			200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan					
			200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran					
			200.2.5.3	Daftar bakal calon					
			200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon					
			200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi					
			200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap					
		200.2.6		Kampanye Pemilu					
			200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye					
			200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye					
			200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		200.2.7		Dana Kampanye					
			200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye					
			200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu					
			200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye					
		200.2.8		Pemungutan dan Penghitungan Suara					
			200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara					
			200.2.8.2	Master surat suara					
			200.2.8.3	Surat suara yang terpakai					
			200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)					
			200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah					
		200.2.9		Penetapan Hasil Pemilu					
		200.2.10		Perselisihan Hasil Pemilu					
			200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu					
			200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon					
			200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan					
		200.2.11		Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu					
300				KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP
	300.1			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		300.1.1		Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP
		300.1.2		Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP
			300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP
			300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Satpol PP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
		300.1.3		Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP
		300.1.4		Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP
		300.1.5		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP
		300.1.6		Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbuka	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP
	300.2			PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN	Biasa / Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPKP
		300.2.1		Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Penindakan - DPKP
		300.2.2		Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Pencegahan - DPKP
			300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Sub Bagian Perencana - DPKP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum)		tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Perencana - DPKP
			300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Penindakan - DPKP
			300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Penindakan - DPKP
			300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Penindakan - DPKP
			300.2.2.6	Registrasi BEACON					
		300.2.3		Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Pencegahan - DPKP
		300.2.4		Potensi Pencarian dan Pertolongan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Pencegahan - DPKP
		300.2.5		Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Kepegawaian - DPKP
			300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Kepegawaian - DPKP
			300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas ,	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Sub Bagian Pencegahan -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						APH (Aparat Penegak Hukum)		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	DPKP
			300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Pencegahan - DPKP
			300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa / Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sub Bagian Pencegahan - DPKP
			300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Terbatas		Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Pencegahan - DPKP
		300.2.6		Operasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa / Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sub Bagian Penindakan - DPKP
		300.2.7		Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Penindakan - DPKP
		300.2.8		Operasi Komunikasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Kedaruratan dan Logistik - BPBD
			300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Kedaruratan dan Logistik - BPBD
			300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang Kedaruratan dan Logistik - BPBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum)		Perangkat Daerah	
			300.2.8.3	Registrasi BEACON	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Kedaruratan dan Logistik - BPBD
		300.2.9		Inventarisasi dan Pemeliharaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Pemadaman Penyelamatan da Sarana Prasarana - DPKP
		300.2.10		Pengembangan Sistem Informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Perencana - DPKP
		300.2.11		Penyajian dan Layanan Informasi	Biasa / Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sub Bagian Pemadaman Penyelamatan da Sarana Prasarana - DPKP
		300.2.12		Pelapooran dan Evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Perencana - DPKP
			300.2.12.1	Laporan Harian					
			300.2.12.2	Laporan Bulanan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Perencana - DPKP
			300.2.12.3	Laporoan Tahunan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sub Bagian Perencana - DPKP
			300.2.12.4	Evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Sub Bagian Perencana - DPKP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
400				KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinsos PPA, Dinas PMD, Bagian Kesra (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Dinas PPKB
	400.1			PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					
		400.1.1		Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		400.1.2		Pembangunan Sumber Daya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PMD
			400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya					
			400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya					
			400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya					
			400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup					
			400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi					
			400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dinsos PPA, Dinas PMD, Bagian Kesra (Asisten Pemerintahan dan
			400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinsos PPA, Dinas PMD, Bagian Kesra (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PPKB
		400.1.3		Peningkatan Infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinsos PPA, Dinas PMD, Bagian Kesra (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Dinas PPKB
			400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur					
			400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur					
			400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
		400.1.4		Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Kepala Bidang Penataan dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kerjasama Desa
			400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Kepala Bidang Penataan dan
			400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
		400.1.5		Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum		tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kemasyarakatan Desa
			400.1.5.5	Ketenagakerjaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
			400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		400.1.6		Pengembangan Daerah Khusus	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PMD
			400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Kepala Bidang Penataan dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kerjasama Desa
			400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	Terbatas	Internal	Tertutup	Memiliki dampak	Kepala Bidang
			400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
	400.2			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
		400.2.1		Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
		400.2.2		Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
			400.2.2.1	Data gender	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
			400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
		400.2.3		Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Bidang PP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Daerah	
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang PA
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Terbatas	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
			400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
			400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
		400.2.4		Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PA
			400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang PA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.2.4.2	Data perlindungan anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas ,	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Bidang PA
			400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
		400.2.5		Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang PA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
			400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
			400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang PA
			400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
		400.2.6		Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PP
		400.2.7		Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
		400.2.8		Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PA
	400.3			PENDIDIKAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pendidikan
		400.3.1		Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Internal dan Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
		400.3.2		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pendidikan
			400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.2.2	Pelatihan Sosial	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.2.3	Peringatan Hari anak	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat	Dinas Pendidikan
			400.3.2.4	Block Grant	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
		400.3.3		Pendidikan Masyarakat					
			400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			400.3.3.3	Pembinaan Program	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.3.5	Pameran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pendidikan
			400.3.3.6	Rakor	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas
			400.3.3.7	Sosialisasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
		400.3.4		Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pendidikan
		400.3.5		Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama					
			400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.3.5.2	Block Grant	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan	Dinas Pendidikan
			400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
		400.3.6		Pendidikan khusus/Layanan Khusus					
			400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.6.2	Block Grant	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.6.3	Lomba, festival	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)			
			400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.6.5	Pendataan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.6.6	Kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pendidikan
		400.3.7		Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik					
			400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.7.3	Sertifikasi Guru	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Terbatas	Internal (Es.	Terbatas	Terganggunya	Dinas
			400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Dinas Pendidikan
			400.3.7.7	Block Grant	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
		400.3.8		Sekolah Menengah Atas					
			400.3.8.1	Kurikulum					
			400.3.8.2	Bahan Ajar					
			400.3.8.3	Pelatihan					
			400.3.8.4	Block grant					
			400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi					
			400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival					
			400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)					
			400.3.8.8	Bantuan siswa miskin					
		400.3.9		Pendidikan Khusus-Layanan Khusus					
			400.3.9.1	Bahan ajar					
			400.3.9.2	Petunjuk Teknis					
			400.3.9.3	Block grant					
			400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek					
			400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival					
			400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran					
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran					
			400.3.9.8	Pendataan					
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi					
		400.3.10		Pendidik dan Tenaga Pendidik					
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Daerah	
			400.3.10.3	Setifikasi Guru	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Dinas Pendidikan
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pendidikan
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik					
			400.3.10.7	Block grant	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pendidikan
		400.3.11		Penilaian Pendidikan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.11.1	Penilaian Akademik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dinas Pendidikan
			400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum)		Perangkat Daerah	
			400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
		400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pendidikan
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
		400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan					
			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400.4			KEOLAHRAGAAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Binmudora
		400.4.1		Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.4.2		Pengelolaan Olahraga Pendidikan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Binmudora
		400.4.3		Pengelolaan Olahraga Rekreasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas	Terbatas	Terganggunya kelancaran	Binmudora
			400.4.3.1	Olahraga Massal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Binmudora
			400.4.3.2	Olahraga Tradisional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Binmudora

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Binmudora
		400.4.4		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.4.3	Olahraga Prestasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan	Binmudora
			400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.4.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Binmudora
			400.4.5.1	Olahraga Tradisional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Binmudora
			400.4.5.2	Layanan Khusus	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		400.4.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
			400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
			400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
		400.4.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
			400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.7.2	Kompetisi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.7.3	IPTEK Olahraga	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.4.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Binmudora

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		perangkat daerah.	
		400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.9.1	Industri Olahraga	Terbatas	Internal (Es.	Terbatas	Terganggunya	Binmudora
			400.4.9.2	Promosi Olahraga	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.4.10		Olahraga Prestasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.10.1	Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.10.2	Nasional	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.4.10.3	Internasional	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
			400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaa	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
			400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya kedaulatan negara	Binmudora
			400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	Rahasia	Kepala	Rahasia	Terganggunya	Binmudora

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Perangkat Daerah, APH dan Pengawas		penyelenggaraan fungsi lembaga negara	
	400.5			KEPEMUDAAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Disporabud
		400.5.1		Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
		400.5.2		Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.2.3	Pengembangan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.5.3		Peningkatan Wawasan Pemuda	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	Terbatas	Internal (Es.	Terbatas	Terganggunya	Binmudora

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	
			400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.5.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	Terbatas	Internal (Es.	Terbatas	Terganggunya	Binmudora
		400.5.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.5.1	Pengkajian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.5.2	Pengembangan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		400.5.6		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas	Terbatas	Terganggunya kelancaran	Binmudora
		400.5.7		Kewirausahaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.7.1	Kelembagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.7.2	Pengaderan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.7.3	Perintisan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.5.8		Organisasi Kepemudaandan Pengawasan Kepramukaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas	Terbatas	Terganggunya kelancaran	Binmudora

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sumberdaya		, APH (Aparat		pelaksanaan	
			400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.5.9		Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.9.1	Standardisasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
			400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Binmudora
		400.5.10		Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
			400.5.10.1	Kemitraan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah, APH dan Pengawas	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Binmudora
			400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	Rahasia	Kepala Perangkat	Rahasia	Terganggunya penyelenggaraan	Binmudora
	400.6			KEBUDAYAAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
		400.6.1		Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
		400.6.2		Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.2.1	Registrasi Nasional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.2.2	Pelindungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Kebudayaan
		400.6.3		Pembinaan Kesenian dan Perfilman	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
		400.6.4		Sejarah dan Nilai Budaya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.4.1	Sejarah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Kebudayaan
			400.6.4.2	Pemetaan nilai	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
		400.6.5		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.5.2	Kekayaan budaya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
			400.6.5.4	Diplomasi budaya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kebudayaan
	400.7			KESEHATAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
		400.7.1		Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Ter	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.2		Upaya Kesehatan Dasar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit					
			400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.9	Pembiayaan darah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah					
			400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.3		Upaya Kesehatan Rujukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat					
			400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya					
			400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan					
			400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit					
			400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)					
			400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya					
		400.7.4		Keperawatan dan keteknisian medik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit					
			400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum					
			400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus					
			400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.5.2	Patologi dan toksilogi	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.5.3	Radiologi	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kesehatan
			400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		400.7.6		Kesehatan Jiwa	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Perangkat Daerah	
			400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		400.7.7		Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.7.2	Imunisasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.7.4	Kesehatan matra	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.8		Pengendalian penyakit menular langsung	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
			400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.9		Pengendalian penyakit bersumber binatang	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.9.1	Pengendalian malaria	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
			400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.10		Pengendalian penyakit tidak menular	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.10.3	Penyakit kanker	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.11		Penyehatan lingkungan	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kesehatan
			400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.12		Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.13		Gizi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			400.7.13.1	Gizi makro	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.13.2	Gizi mikro	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.14		Kesehatan ibu	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
			400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.14.4	Keluarga berencana	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.15		Kesehatan anak	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				remaja	Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kesehatan
			400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.17		Kesehatan kerja dan Olah raga	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.17.2	Kapasitas kerja	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.17.3	Lingkungan kerja	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.17.6	Kesehatan olahraga	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.18		Obat Publk dan perbekalan kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.18.1	Harga obat publik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			400.7.18.2	Pengadaan obat	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.19.1	Alat kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.20		Kefarmasian	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.7.20.2	Farmasi klinis	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.20.3	Farmasi Komunitas	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.21.1	Obat tradisional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perijinan	Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Kesehatan
			400.7.22.1	Surat keterangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
		400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		400.7.25		Intelegensia Kesehatan	Rahasia	Rahasia	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaran fungsi lembaga negara	Dinas Kesehatan
			400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	Rahasia	Rahasia	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaran fungsi lembaga negara	Dinas Kesehatan
			400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	Rahasia	Rahasia	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaran fungsi lembaga negara	Dinas Kesehatan
		400.7.26		Kesehatan Haji	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.27		Promosi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.27.4	Hari Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.28		Data dan Informasi	Sangat Rahasia	Sangat Rahasia	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Dinas Kesehatan
			400.7.28.1	Statistik kesehatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kesehatan
			400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		400.7.29		Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	Terbatas	Terbatas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
			400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
		400.7.30		Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan atau Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kesehatan
			400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan atau Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan atau Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan atau Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		400.7.31		Rekam Medis	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Kesehatan
	400.8			AGAMA DAN KEPERCAYAAN	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bagian Kesra
		400.8.1		Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								negara	Nganjuk
		400.8.2		Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			400.8.2.1	Data ForumKomunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			400.8.2.4	Kasus Keagamaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Badan Kesatuan
			400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan					
		400.8.3		Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								negara	Nganjuk
			400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
			400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Badan Kesatuan
	400.9			SOSIAL	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinsos PPA
		400.9.1		Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
		400.9.2		Kesejahteraan Sosial Anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Bidang Linjamrehsos
			400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dengan hukum		Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Linjamrehsos
			400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Terbuka				
		400.9.3		Rehabilitasi Sosial	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PPA
			400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
			400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Bidang Linjamrehsos
			400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
		400.9.4		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang Linjamrehsos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
			400.9.4.2	Tuna susila dan korban traffking perempuan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
			400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
			400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
		400.9.5		Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
		400.9.6		Pelayanan sosial lanjut usia	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang
			400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
			400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
			400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
		400.9.7		Pengumpulan dan Pengelolaan sumber	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dana bantuan sosial	Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Linjamrehsos
		400.9.8		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
		400.9.9		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang Linjamrehsos
			400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
		400.9.10		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Linjamrehsos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Bidang Linjamrehsos
			400.9.10.4	Kerjasama	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
		400.9.11		Jaminan Sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Linjamrehsos
			400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.11.4	Kerjasama	Terbatas	Internal (Es.	Tertutup	Memiliki dampak	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Linjamrehsos
		400.9.12		Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.12.1	Ketahanan keluarga	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang
			400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Linjamrehsos
			400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
		400.9.13		Pemberdayaan komunitas adat terpencil	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang PSK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
			400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang PSK
			400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.134	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PSK
		400.9.14		Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Bidang PSK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.14.5	Bantuan Langsung	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PSK
		400.9.15		Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PSK
			400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang PSK
	400.10			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas PMD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
		400.10.1		Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PMD (Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bina Pemerintahan Desa, Keuangan Aset dan Ekonomi)
		400.10.2		Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
			400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
			400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas ,	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Kepala Bidang Bina Pemerintahan
			400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
			400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PMD
			400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas PMD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
		400.10.3		Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PMD (Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bina Pemerintahan Desa, Keuangan Aset dan Ekonomi)
			400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		400.10.4		Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya	Terbatas	Internal	Tertutup	Memiliki dampak	Kepala Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Masyarakat		(Es.III), Aparat Penegak Hukum		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.4.1	Budaya Nusantara	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Internal (Es.III),	Tertutup	Memiliki dampak	Kepala Bidang
			400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		400.10.5		Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa
			400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
		400.10.6		Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
			400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
			400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	Terbatas	Internal (Es.III), Aparat Penegak Hukum	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
		400.10.7		Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PMD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400.11			PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		400.11.1		Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		400.11.2		Pertamanan					
			400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan					
			400.11.2.2	Taman Kota					
			400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota					
		400.11.3		Pemakaman					
			400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman					
			400.11.3.2	Pemakaman					
			400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman					
		400.11.4		Jalur Hijau	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau					
			400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan					
			400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air					
		400.11.5		Peran Serta Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		400.11.6		Pengawasan dan Penindakan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		400.11.7		Pengelolaan Data					
		400.11.8		Evaluasi dan Pelaporan					
	400.12			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dispenduk Capil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
		400.12.1		Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.					
		400.12.2		Pendaftaran Penduduk	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.2.1	Identitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		400.12.3		Pencatatan Sipil	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dispenduk Capil
			400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
		400.12.4		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dispenduk Capil
			400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dispenduk Capil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
			400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
		400.12.5		Pengembangan Kebijakan Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.5.2	Kualitas Penduduk	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dispenduk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Capil
			400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
		400.12.6		Penyerasian Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.6.1	Indikator Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dispenduk Capil

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
			400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dispenduk Capil
	400.13			KELUARGA BERENCANA	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PPKB
		400.13.1		Kebijakan di bidangKeluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
		400.13.2		Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
			400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
			400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Internal (Es.	Tertutup	Memiliki dampak	Dalduk dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	SiGa
		400.13.3		Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
			400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dalduk dan SiGa
			400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
		400.13.4		Profil dan proyeksi penduduk	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
			400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
			400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
		400.13.5		Penetapan parameter pengendalian penduduk	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dalduk dan SiGa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(Aparat Penegak Hukum)		Perangkat Daerah	
			400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
			400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dalduk dan SiGa
		400.13.6		Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
			400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
			400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
		400.13.7		Pengembangan Sistem	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
			400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dalduk dan SiGa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
		400.13.8		Pengembangan Materi	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dalduk dan
			400.13.8.1	Pengembangan MateriJalur Pendidikan Formal	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
			400.13.8.2	Pengembangan MateriJalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dalduk dan SiGa
		400.13.9		Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
			400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
			400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
		400.13.10		Analisis Sosial	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum)			
		400.13.11		Analisis Ekonomi	Terbatas	Internal (Es. III),	Tertutup	Memiliki dampak	Dinas PPKB
		400.13.12		Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PPKB
		400.13.13		Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PPKB
		400.13.14		Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
		400.13.15		Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
		400.13.16		Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Terbatas	Internal (Es. III),	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Bidang KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengawas , APH			
		400.13.17		Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
		400.13.18		Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
		400.13.19		Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
		400.13.20		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang KB
			400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan		untuk Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
		400.13.21		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
		400.13.22		Kesertaan keluarga berencana pria	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)			
		400.13.23		Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
		400.13.24		Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PPKB
		400.13.25		Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PPKB
		400.13.26		Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PPKB
			400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.27		Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang PK
			400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Bidang PK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Internal dan Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.28		Pelembagaan bina ketahanan remaja	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.28.1	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.29		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		400.13.30		Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.31		Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang PK
			400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.32		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.33		Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.34		Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.35		Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.35.2	Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.36		Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.37		Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang PK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
		400.13.38		Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang PK
			400.13.38.2	Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.39		Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
			400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PK
		400.13.40		Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas ,	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Bidang KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						APH (Aparat Penegak Hukum)		tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Terbatas	Internal (Es. III),	Tertutup	Memiliki dampak	Bidang KB
		400.13.41		Advokasi dan pencitraan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
		400.13.42		Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.42.1	Promosi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.42.3	Produk media komunikasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
		400.13.43		Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Bidang KB
		400.13.44		Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Bidang KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
		400.13.45		Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
		400.13.46		Tenaga Lini Lapangan	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang KB
			400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
		400.13.47		Institusi Masyarakat Pedesaan	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Bidang KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Internal dan Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
		400.13.48		Mekanisme Operasional lini lapangan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang KB
			400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
			400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang KB
		400.13.49		Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
			400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	Terbatas	Internal (Es. III),	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Dalduk dan SiGa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
		400.13.50		Pengumpulan dan pengolahan data	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
		400.13.51		Analisis dan evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
			400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Dalduk dan SiGa
			400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
		400.13.52		Sistem aplikasi dan bank data	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PPKB
			400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas ,	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Dalduk dan SiGa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						APH (Aparat Penegak Hukum)		tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			400.13.52.2	Pengelolaan bank data	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
		400.13.53		Infrastruktur teknologi informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
			400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
			400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dalduk dan SiGa
		400.13.54		Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang KB
			400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Bidang KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Internal dan Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
	400.14			HUBUNGAN MASYARAKAT	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Asisten Administrasi Umum (Bagian Humas)
		400.14.1		Keprotokolan					
			400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)					
			400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan					
			400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah					
			400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri					
		400.14.2		Daftar nama/alamat kantor /pejabat					
		400.14.3		Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media					
		400.14.4		Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan					
			400.14.4.1	Kliping koran					
			400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat					
			400.14.4.3	Pengumuman /pemberitaan					
		400.14.5		Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Asisten Administrasi Umum (Bagian Humas)
			400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah					
			400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM					
			400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan					
			400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			400.14.5.5	Forum Kehumasan					
			400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa					
		400.14.6		Dengar pendapat/hearing DPRD	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Asisten Administrasi Umum (Bagian Humas)
		400.14.7		Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Asisten Administrasi Umum (Bagian Humas)
		400.14.8		Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Asisten Administrasi Umum (Bagian Humas)
		400.14.9		Publikasi melalui media cetak maupun elektronik					
		400.14.10		Pameran / sayemara / lomba / festival, pembuatan spanduk dan iklan					
		400.14.11		Penghargaan/tanda kenang-kenangan					
		400.14.12		Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf					
500				PEREKONOMIAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	500.1			KETAHANAN PANGAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		500.1.1		Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
		500.1.2		Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.2.2	Akses Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.2.3	Kerawaan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
		500.1.3		Distribusi dan Cadangan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.3.1	Distribusi Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.3.2	Harga Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
			500.1.3.3	Cadangan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Memiliki dampak terganggunya Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan
		500.1.4		Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.4.1	Konsumsi Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
		500.1.5		Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
			500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
			500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
		500.1.6		Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
		500.1.7		Bimbingan Teknis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Ketahanan Pangan
		500.1.8		Evaluasi	Terbatas	Internal (ESS III,Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya Penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah	Bidang Ketahanan Pangan
	500.2			PERDAGANGAN					
		500.2.1		Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.2.2		Perdagangan Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Perindustrian dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	Perdagangan
			500.2.2.2	Bina Usaha Jasa Perdangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.4.	Informasi Perusahaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.5	Pelaku Pasar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.14	Informasi Pasar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.2.16	Barang Strategis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.2.3		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindag dan UPT Perlindungan Konsumen Kediri
			500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.4	Tata usaha	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	UPT Perlindungan Konsumen
			500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	UPT Perlindungan Konsumen
			500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	UPT Perlindungan Konsumen
			500.2.3.11	Jasa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	UPT Perlindungan Konsumen
			500.2.3.12	Kerjasama	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Perindustrian dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	Perdagangan
			500.2.3.16	Pengawasan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.2.4		Perdagangan Berjangka Komoditi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.4.1	Pengkajian pasar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.4.4	Pengkajian pasar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.4.5	Pengembangan Pasar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Perindustrian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan	dan Perdagangan
			500.2.4.6	Sistem informasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.2.5		Bimbingan Teknis	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.2.6		Evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	500.3			KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
		500.3.1		Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Diskopum Bid.Koperasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
		500.3.2		Kelembagaan Koperasi dan UKM	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.UM
			500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Diskopum Bid.Koperasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
		500.3.3		Produksi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Diskopum Bid.Koperasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
		500.3.4		Pembiayaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.4.1	Program Pendanaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.4.3	Urusan Permodalan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Diskopum Bid.Koperasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
			500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
		500.3.5		Pemasaran dan Jaringan Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.5.2	Ekspor dan Impor	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.UM
			500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
		500.3.6		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.UM
			500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Diskopum
			500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.UM
			500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.UM
			500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat	Diskopum Bid.Koperasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			500.3.6.5	Advokasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
		500.3.7		Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Diskopum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bid.Koperasi
			500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
		500.3.8		Pengkajian Sumber Daya UKMK	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.8.1	Penelitian Koperasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.8.2	Penelitian UKM	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.UM
			500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
		500.3.9		Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
		500.3.10		Pedagang Kaki Lima (PKL)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Diskopum Bid.Koperasi
			500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan		Eksternal		Lembaga dan Negara	
			500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
		500.3.11		Monitoring dan Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Diskopum Bid.Koperasi
					Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Diskopum Bid.UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
	500.4			KEHUTANAN					
		500.4.1		Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		500.4.2		Penyuluhan					
			500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan					
			500.4.2.2	Materi Penyuluhan					
			500.4.2.3	Program Penyuluhan					
			500.4.2.4	Sarana Penyuluhan					
			500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan					
			500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan					
			500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat					
			500.4.2.8	Deseminasi					
			500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan					
		500.4.3		Planologi Kehutanan					
			500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan					
			500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan					
			500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan					
			500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan					
			500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan					
			500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan					
			500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan					
			500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan					
			500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan					
			500.4.3.10	Jaringan Data Spasial					
			500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan					
			500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan					
			500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan					
			500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
			500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan					
			500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan					
		500.4.4		Bina Usaha Kehutanan					
			500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK					
			500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK					
			500.4.4.3	Kerjasama					
			500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan					
			500.4.4.5	Perpanjangan					
			500.4.4.6	Modal dan Peralatan					
			500.4.4.7	Investasi Industri					
			500.4.4.8	Peralatan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.4.4.9	Tenaga Kerja					
			500.4.4.10	Pemegang Saham					
			500.4.4.11	Neraca Perusahaan					
			500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)					
			500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)					
			500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)					
			500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)					
			500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja					
			500.4.4.17	Produksi Kayu					
			500.4.4.18	Produksi non kayu					
			500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK					
			500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK					
			500.4.4.21	Industri Non Kayu					
			500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp					
			500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan					
			500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi					
			500.4.4.25	Pemblokiran					
			500.4.4.26	Denda					
			500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK					
			500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi					
			500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi					
			500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi					
			500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha					
			500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam					
			500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil					
			500.4.4.34	Produksi Hutan Alam					
			500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam					
			500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri					
			500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat					
			500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi					
			500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman					
			500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman					
			500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan					
			500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan					
			500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan					
			500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan					
			500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan					
			500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan					
			500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK					
			500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur					
		500.4.5		Standardisasi dan Lingkungan					
			500.4.5.1	Standardisasi					
			500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan					
			500.4.5.3	Pengembangan					
			500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan					
			500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan					
			500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan					
			500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan					
			500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan					
			500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan					
			500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan					
			500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan					
		500.4.6		Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam					
			500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi					
			500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi					
			500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang					
			500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati					
			500.4.6.5	Kawasan Konservasi					
			500.4.6.6	Pengamanan Hutan					
			500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan					
			500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan					
			500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)					
			500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam					
			500.4.6.11	Bina Cinta Alam					
			500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam					
			500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA					
		500.4.7		Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial					
			500.4.7.1	Pengelolaan Benih					
			500.4.7.2	Kebun Benih					
			500.4.7.3	Tegakan Benih					
			500.4.7.4	Pengadaan Benih					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih					
			500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih					
			500.4.7.7	Pembibitan					
			500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih					
			500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan					
			500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih					
			500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
			500.4.7.12	Tanaman Reboisasi					
			500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					
			500.4.7.14	Perhutanan Sosial					
			500.4.7.15	Pengendalian Perladangan					
		500.4.8		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan					
			500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan					
			500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian					
			500.4.8.3	Diseminasi					
			500.4.8.4	Gelar Teknologi					
			500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan					
	500.5			KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		500.5.1		Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		500.5.2		Perikanan Tangkap					
			500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap					
			500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan					
			500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan					
			500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan					
			500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan					
			500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
			500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan					
			500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan					
			500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan					
			500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan					
			500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan					
			500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan					
			500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha					
			500.5.2.14	Kenelayanan					
			500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan					
		500.5.3		Perikanan Budidaya					
			500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air					
			500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar					
			500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar					
			500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil					
			500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan					
			500.5.3.6	Budidaya Air Tawar					
			500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias					
			500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan					
			500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya					
			500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan					
			500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya					
			500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya					
			500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya					
			500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya					
			500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan					
			500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya					
		500.5.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
			500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil					
			500.5.4.2	Pengembangan Produk					
			500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					
			500.5.4.4	Industri Pengolahan					
			500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil					
			500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi					
			500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias					
			500.5.4.8	Pengembangan Industri					
			500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi					
			500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri					
			500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri					
			500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri					
			500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri					
			500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri					
			500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri					
			500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri					
			500.5.4.17	Pengembangan Ekspor					
			500.5.4.18	Pengembangan Impor					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri					
			500.5.4.20	Pelayanan Usaha					
			500.5.4.21	Kemitraan Usaha					
			500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran					
			500.5.4.23	Investasi dan Permodalan					
			500.5.4.24	Informasi dan Promosi					
		500.5.5		Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					
			500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi					
			500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I					
			500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II					
			500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial					
			500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi					
			500.5.5.6	Konservasi Wawasan					
			500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan					
			500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan					
			500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan					
			500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan					
			500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut					
			500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi					
			500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil					
			500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil					
			500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil					
			500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil					
			500.5.5.17	Akses Permodalan					
			500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
			500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat					
			500.5.5.20	Pengembangan Usaha					
		500.5.6		Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan					
			500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat					
			500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur					
			500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran					
			500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya					
			500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi					
			500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan					
			500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil					
			500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat					
			500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur					
			500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas					
			500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas					
			500.5.6.13	Sistem Pemantauan					
			500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan					
			500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan					
			500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan					
			500.5.6.17	Penyidikan					
			500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal					
			500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan					
			500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran					
		500.5.7		Karantina Ikan					
			500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan					
			500.5.7.2	Penahanan					
			500.5.7.3	Pengasingan					
			500.5.7.4	Pengamatan					
			500.5.7.5	Pengakuan					
			500.5.7.6	Penolakan					
			500.5.7.7	Pemusnahan					
			500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan					
			500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran					
			500.5.7.10	Permohonan Sertifikat					
			500.5.7.11	Pemasukan Formulir					
			500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat					
			500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat					
			500.5.7.14	Surat Perintah					
			500.5.7.15	Rekomendasi					
			500.5.7.16	Penutupan Suatu Area					
			500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan					
			500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan					
			500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional					
			500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara					
			500.5.7.21	Lokasi Karantina					
	500.6			PERTANIAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		500.6.1		Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat Dinas Pertanian
		500.6.2		Perlindungan hortikultura	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
		500.6.3		Perbenihan Hortikultura	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.3.1	Penilaian Varietas	Terbatas	Internal (Es. III),	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Bidang Produksi dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.6.4		Perluasan dan Pengelolaan Lahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.4.1	Basis Data Lahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.4.2	Pengendalian Lahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang Perlindungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga	
			500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
		500.6.5		Pengelolaan Air Irigasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.5.4	Kelembagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
		500.6.6		Pembiayaan Pertanian					
			500.6.6.1	Pembiayaan Program					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama					
			500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis					
			500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis					
		500.6.7		Pupuk Pestisida	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.7.2	Pupuk Anorganik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.7.3	Pestisida	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
		500.6.8		Alat dan Mesin Pertanian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)			
			500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
			500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
		500.6.9		Perbenihan Tanaman Pangan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.9.2	Produksi Benih Serealia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang Produksi dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Internal dan Eksternal		perorangan Lembaga dan Negara	Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.9.4	Kelembagaan Benih	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.6.10		Budidaya Serealia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga	Bidang Produksi dan Perizinan
			500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.10.3	Jagung	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.10.4	Serealia Lain	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.6.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.11.1	Kedelai	Biasa/	Terbuka	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal Eksternal untuk dan		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.11.2	Ubi Kayu	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.11.3	Aneka Kacang	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.11.4	Aneka Umbi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.6.12		Tanaman Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga	Bidang Perlindungan
			500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
		500.6.13		Pascapanen Tanaman Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.13.1	Padi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.13.4	Aneka Umbi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.6.14		Pengolahan Hasil Pertanian	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.14.1	Tanaman Pangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang Produksi dan Perizinan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga	
			500.6.14.2	Holtikurtura	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.14.3	Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.14.4	Peternakan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		500.6.15		Mutu dan Standariasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.15.1	Standardisasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang Produksi dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal untuk dan		perorangan Lembaga dan Negara	Perizinan Usaha Pertanian
		500.6.16		Pengembangan Usaha dan Investasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan					
			500.6.16.2	Investasi					
			500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	-	-	-	-	-
		500.6.17		Pemasaran Domestik	-	-	-	-	-
			500.6.17.1	Informasi Pasar	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.6.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja,	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat		Eksternal untuk dan		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
		500.6.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan					
			500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan					
			500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi					
		500.6.20		Diseminasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Sekretariat Dinas Pertanian
		500.6.21		Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Pengembangan SDM dan KPP
			500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Pengembangan SDM dan KPP
			500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya					
		500.6.22		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan					
		500.6.23		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan					
		500.6.24		Data Penelitian dan Pengembangan					
		500.6.25		Evaluasi Penelitian/Pengkajian dan Pengembangan					
		500.6.26		Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)					
			500.6.26.1	Hak Cipta					
			500.6.26.2	Hak Paten Sederhana					
			500.6.26.3	Hak Paten Biasa					
			500.6.26.4	Hak Merek					
			500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak			
			500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	-	-	-	-	-
		500.6.27		Pelayanan Perijinan Pertanian	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.6.28		Pelayanan Hukum	-	-	-	-	-
			500.6.28.1	Sertifikas	-	-	-	-	-
			500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	-	-	-	-	-
		500.6.29		Karantina Pertanian	-	-	-	-	-
			500.6.29.1	Karantina Tumbuhan	-	-	-	-	-
			500.6.29.2	Karantina Hewan	-	-	-	-	-
		500.6.30		Bimbingan Teknis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		500.6.31		Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Perencanaan
	500.7			PETERNAKAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
		500.7.1		Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
		500.7.2		Peternakan dan Kesehatan Hewan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
			500.7.2.	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
			500.7.2.	Pakan Ternak	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
			500.7.2.	Budidaya Ternak	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
			500.7.2.	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan	Biasa/	Terbuka	Terbuka	Tidak memiliki	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan	Terbuka	untuk Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Peternakan dan Keswan Pertanian
			500.7.2.	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
		500.7.3		Bimbingan Teknis	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
		500.7.4		Evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Peternakan dan Keswan Pertanian
	500.8			PERKEBUNAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.8.1		Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
		500.8.2		Tanaman Semusim	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	Pertanian
			500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.8.3		Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga	Bidang Produksi dan Perizinan
			500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Bidang Produksi dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal untuk dan		perorangan Lembaga dan Negara	Perizinan Usaha Pertanian
		500.8.4		Tanaman Tahunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.8.5		Perlindungan Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka Internal Eksternal untuk dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
			500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Perlindungan Pertanian
		500.8.6		Pascapanen dan Pembinaan Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
			500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.8.7		Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untu Internal da Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
		500.8.8		Evaluasi Perkebunan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untu Internal da Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang Produksi dan Perizinan Usaha Pertanian
	500.9			PERINDUSTRIAN					
		500.9.1		Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.2		Iklim Usaha dan Kerja Sama	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.2.1	Industri Manufaktur	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.2.2	Industri Agro	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.3		Promosi Industri	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.3.1	Industri Manufaktur	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.3.2	Promosi Industri Agro	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.4		Standarisasi dan Teknologi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
			500.9.4.1	Industri Manufaktur	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.4.2	Industri Agro	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.5		Hak dan Kekayaan Intelektual	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.5.1	Industri Manufaktur	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.5.2	Industri Agro	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum), Pengawas		negara	
			500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.6		Industri Hijau	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.6.1	Industri Manufaktur	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.6.2	Industri Agro	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.7		Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/ Kota	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.8		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		500.9.9		Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.10		Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.11		Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.12		Standarisasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.12.	Standar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.12.	Penyiapan Penerapan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.12.	Infrastruktur Standar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.13		Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.13.1	Kebijakan Industri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.14		Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.14.1	Industri Hijau	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.14.2	Lingkungan Hidup	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.14.3	Energi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.15		Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Rahasia	Kepala Perangkat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Dinas Perindustrian

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas		penyelenggaraan fungsi lembaga negara	dan Perdagangan
			500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		500.9.16		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	500.10			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Asisten Perekonomian
		500.10.1		Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		500.10.2		Rekomendasi Kegeologian					
			500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah					
			500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan					
			500.10.2.3	Pertambangan					
			500.10.2.4	Panas Bumi					
			500.10.2.5	Geosains					
			500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)					
			500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan					
		500.10.3		Penelitian Kegeologian					
			500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian					
			500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian					
			500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian					
			500.10.3.4	*Log-book* peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian					
			500.10.3.6	Sumber Daya Geologi					
			500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan					
			500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi					
			500.10.3.9	Survei Geologi					
		500.10.4		Inventarisasi dan evaluasi kegeologian					
			500.10.4.1	Sumber Daya Geologi					
			500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi					
			500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan					
			500.10.4.4	Survei Geologi					
			500.10.4.5	Konservasi					
		500.10.5		Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi					
			500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran					
			500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan					
			500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara					
			500.10.5.4	Survei Geologi					
		500.10.6		Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi					
			500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi					
			500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah					
			500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP					
			500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)					
			500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri					
			500.10.6..8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)					
		500.10.7		Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)					
			500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)					
			500.10.7.3	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)					
			500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD					
			500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS					
			500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas					
			500.10.7.7	Partisipasi Interest					
			500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan					
		500.10.8		Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan					
			500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran					
			500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		500.10.9		Teknik dan Lingkungan					
			500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)					
			500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT					
			500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)					
			500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las					
			500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi					
			500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi					
			500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan					
			500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: urat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.9.10	Usaha penunjang					
		500.10.10		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi					
		500.10.11		Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi					
			500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi					
			500.10.11.2	Pemerintah Daerah dan Lembaga					
			500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi					
			500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT					
			500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT					
			500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi					
			500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT					
		500.10.12		Panas Bumi					
			500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)					
			500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)					
			500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan					
			500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak					
			500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak					
			500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair					
			500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las					
			500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)					
			500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)					
			500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)					
			500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi					
			500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)					
			500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi					
			500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi					
			500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi					
			500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi					
			500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi					
		500.10.13		Bioenergi					
			500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)					
			500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)					
			500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Impor					
			500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)					
			500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN					
			500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi					
			500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik					
			500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati					
			500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga					
		500.10.14		Aneka Energi					
			500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi					
			500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha					
			500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing					
			500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham					
			500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)					
		500.10.15		Konservasi Energi					
			500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi					
			500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi					
			500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE					
			500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast					
			500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi					
			500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca					
			500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi					
			500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi					
			500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)					
			500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		500.10.16		Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE					
			500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga					
			500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE					
			500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja					
		500.10.17		Bina Program Tenaga Listrik					
			500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik					
			500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu					
			500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan					
		500.10.18		Bina Usaha Ketenagalistikan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin					
			500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik					
			500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik					
			500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PLN (Persero)					
		500.10.19		Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan					
			500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan					
			500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan					
			500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)					
			500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)					
		500.10.20		Sertifikasi					
			500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik					
			500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)					
			500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik					
			500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik					
			500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi					
		500.10.21		Akreditasi Ketenagalistrikan					
		500.10.22		Standarisasi Kompetensi					
		500.10.23		Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan					
			500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan					
			500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan					
			500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan					
			500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan					
		500.10.24		Standardisasi Usaha Penunjang					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketenagalistrikan					
			500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan					
			500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan					
			500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)					
			500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT					
			500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan					
		500.10.25		Bina Program Mineral dan Batubara					
			500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara					
			500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara					
			500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara					
			500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara					
			500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara					
			500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler					
			500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara					
			500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara					
			500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara					
		500.10.26		Pembinaan Pengusahaan Mineral	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.10.26.1	Ketenagakerjaan					
			500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang					
			500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral					
			500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral					
			500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral					
			500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)					
			500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral					
			500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)					
			500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)					
			500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)					
			500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)					
			500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral					
			500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir					
			500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral					
			500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral					
			500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral					
		500.10.27		Pembinaan Pengusahaan Batubara	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			500.10.27.1	Ketenagakerjaan					
			500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang					
			500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara					
			500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara					
			500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara					
			500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara					
			500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara					
			500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)					
			500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)					
			500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)					
			500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)					
			500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)					
			500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara					
			500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir					
			500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara					
			500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara					
			500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara					
		500.10.28		Penerimaan Negara					
			500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak					
			500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
			500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP					
		500.10.29		Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara					
			500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional					
			500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi					
			500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang					
			500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/ Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
			500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan					
			500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)					
			500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)					
			500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia					
			500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang					
			500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan					
			500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan					
			500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara					
			500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara					
			500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi					
			500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi					
			500.10.29.17	Pengawasan Teknis					
			500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara					
			500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis					
		500.10.30		Program Penelitian dan Pengembangan					
			500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan					
			500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi					
			500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi					
			500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi					
			500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					
			500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi					
			500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					
			500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					
			500.10.30.9	Master *proceeding*/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					
			500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					
			500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK					
			500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral					
		500.10.31		Sarana Litbang					
			500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan					
			500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi					
		500.10.32		Afiliasi					
			500.10.32.1	Proyek Percontohan					
			500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi					
			500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Penyajian Informasi					
		500.10.33		Penelitian dan Pengembangan Kegeologian					
			500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan					
			500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai					
			500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan					
			500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan					
		500.10.34		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi					
			500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi					
			500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi					
			500.10.34.3	Laboratorium					
			500.10.34.4	Study					
			500.10.34.5	Teknologi Proses					
			500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk					
			500.10.34.7	Teknologi Gas					
		500.10.35		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara					
			500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya					
			500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral					
			500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara					
		500.10.36		Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan					
			500.10.36.1	Energi baru terbarukan					
			500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan					
			500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi					
	500.11			PERHUBUNGAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubungan
		500.11.1		Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah(Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunyan penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.2		Jaringan Prasarana dan Pelayanan					
			500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	-	-	-	-	-
			500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	-				
			500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal					
			500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	-				
			500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer					
			500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer					
			500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal					
			500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.3		Pengembangan Transportasi Jalan					
			500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	-				
			500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	Biasa/	Terbuka	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	untuk Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Perhubunga n
		500.11.4		Pengujian Kendaraan Bermotor					
			500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Terbatas	Internal (Es. III) Pengawas, APH (Aparat	Tertutup	Memiliki Dampak terganggunya penyelenggaraan	Dinas Perhubunga n
			500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Terbatas	Internal (Es. III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki Dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perhubunga n
		500.11.5		Teknologi Kendaraan Bermotor					
			500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II) APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan Funfsi lembaga negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II) APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan Funfsi lembaga negara	Dinas Perhubunga n

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum), Pengawas			
			500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Terbatas	Internal (Es. III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki Dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perhubunga n
			500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	Terbatas	Internal (Es. III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki Dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perhubunga n
		500.11.6		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
			500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	Terbatas	Internal (Es. III)	Tertutup	Memiliki Dampak	Dinas
			500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.7		Perlengkapan Jalan					
			500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	Terbatas	Internal (Es. III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki Dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perhubunga n
			500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	-				
			500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	-				
			500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	-				
			500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Terbatas	Internal (Es. III) Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki Dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Perhubunga n

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)			
		500.11.8		Angkutan Penumpang					
			500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara					
			500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi					
			500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi					
			500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.8.7	Angkutan perintis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.9		Angkutan Barang					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	-				
			500.11.9.2	Tarif angkutan barang	-				
			500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	-				
			500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas
			500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.10		Monitoring Operasional					
			500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki Dampak Terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi perengkat daerah	Dinas Perhubunga n
		500.11.11		Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil					
			500.11.11.1	Pedoman Teknis					
			500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)					
			500.11.11.3	Bimtek PPNS					
			500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)					
		500.11.12		Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyeberangan					
			500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.13		Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
			500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)					
			500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan					
		500.11.14		Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
		500.11.5		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
			500.11.5.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan					
			500.11.5.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan					
		500.11.16		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan					
			500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan					
			500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan					
			500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional					
			500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		500.11.17		Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan					
		500.11.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan					
			500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki Dampak Terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi perengkat daerah	Dinas Perhubunga n
			500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan					
			500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau					
			500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau					
		500.11.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan					
			500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan					
			500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau					
			500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan					
		500.11.20		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan					
			500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan					
			500.11.20.2	Persetujuan operasikapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional					
		500.11.21		Tarif dan Keperintisan					
			500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan					
			500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan					
		500.11.22		Bina Sistem Transportasi Perkotaan					
			500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan					
			500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi					
		500.11.23		Lalu Lintas Perkotaan					
			500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Perhubunga n
			500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.24		Angkutan Perkotaan					
			500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	-				
		500.11.25		Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan					
			500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak	Biasa/	Terbuka	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Terbuka	untuk Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Perhubunga n
			500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Perhubunga
			500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi					
		500.11.26		Dampak Transportasi Perkotaan					
			500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Perhubunga n

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Internal dan Eksternal		dapat merugikan	
			500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.27		Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan					
			500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.28		Pengembangan Keselamatan					
			500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Perhubunga n
			500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Perhubunga n

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
		500.11.29		Promosi dan Kemitraan Keselamatan					
			500.11.29.1	Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.30		Bina Keselamatan Angkutan Umum					
			500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.31		Audit Keselamatan					
			500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Perhubunga n

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
		500.11.32		Inspeksi Keselamatan					
			500.11.32.1	Pedoman keselamatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Perhubunga n
			500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Perhubunga n
		500.11.33		Parkir					
			500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki Dampak Terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi perengkat daerah	Dinas Perhubunga n
			500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki Dampak Terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi perengkat daerah	Dinas Perhubunga n
			500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	500.12			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.1		Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.2		Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
		500.12.3		Penyiaran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.4		Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.5		Pengendalian Informatika	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.6		e- Government	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e- Government	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.7		e- Business	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e- Business	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-	Terbatas	Internal (Es.	Tertutup	Memiliki dampak	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Business		III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Busniness	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.8		Pemberdayaan Informatika Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.9		Pemberdayaan Industri Informatika	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.10		Keamanan Informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
		500.12.11		Komunikasi Publik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
			500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.12		Pengolahan dan Penyediaan Informasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.12.2	Informasi Perekonomian	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.13		Pengelolaan Media Publik	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
			500.12.13.1	Media Cetak	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.13.2	Media Online	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.14		Kemitraan Komunikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.15		Infrastruktur Informatika	Biasa/	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Terbuka	Internal dan Eksternal		dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			500.12.15.1	Jaringan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.15.3	Keamanan Informatika	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
		500.12.16		Sistem dan Data	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
			500.12.16.1	Portal dan Konten	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kominfo
		500.12.17		Pusat Kerjasama	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	
			500.12.17.1	Kerja Sama daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
		500.12.18		Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.18.1	Pelayanan Informasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.18.2	Hubungan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.18.3	Bimbingan Teknis	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka.	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo
			500.12.18.4	Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Kominfo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	500.13			PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Pariwisata
		500.13.1		Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PDTDP
		500.13.2		Pengembangan Destinasi Wisata	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PDTDP
			500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang PDTDP
			500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PDTDP
			500.13.2.3	Industri Pariwisata	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PDTDP
			500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bidang PDTDP
			500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Bidang PDTDP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
		500.13.3		Pemasaran Pariwisata	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Terbatas	Internal (Es.	Terbatas	Terganggunya	Bidang
			500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
		500.13.4		Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
		500.13.5		Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas	Terbatas	Terganggunya kelancaran	Bidang SDPE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						, APH (Aparat Penegak Hukum)		pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	
			500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas	Terbatas	Terganggunya kelancaran	Bidang SDPE
			500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
		500.13.6		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	Bidang SDPE
			500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat	Terbatas	Terganggunya kelancaran pelaksanaan	Bidang SDPE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	500.14			STATISTIK	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Bappeda
		500.14.1		Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		500.14.2		Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi					
			500.14.2.1	Perencanaan					
			500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba					
			500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan					
			500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi					
			500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus					
			500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus					
		500.14.3		Survei					
			500.14.3.1	Perencanaan					
			500.14.3.2	Persiapan					
			500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas					
			500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi					
			500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan					
			500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei					
		500.14.4		Konsolidasil Data Statistik					
			500.14.4.1	Kompilasi Data					
			500.14.4.2	Analisis data					
			500.14.4.3	Penyusunan Publikasi					
		500.14.5		Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik					
	500.15			KETENAGAKERJAAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Tenaga Kerja
		500.15.1		Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelengaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.2		Perencanaan Tenaga Kerja	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelengaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelengaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelengaraan tugas dan fungsi	Bidang PTK dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		perangkat daerah	
		500.15.3		Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang PTK dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
			500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.6		Bina Pemagangan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang PTK dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
			500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.7		Produktivitas dan Kewirausahaan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.8		Pengembangan Pasar Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Bidang PTK dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						eksternal		dapat merugikan perorangan, Lembaga dan Negara	
			500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan, Lembaga dan Negara	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan, Lembaga dan Negara	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.8.3	Bursa Kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan, Lembaga dan Negara	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.8.4	Analisis Jabatan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.9		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.9.1	Antar Kerja	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang PTK dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
			500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
		500.15.11		Standardisasi Profesi	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang PTK dan Transmigrasi
			500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang PTK dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
		500.15.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.12.2	Perjanjian Kerja	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
		500.15.13		Kelembagaan dan Pemasyarakatan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.13.1	Hubungan Industrial	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan, Lembaga dan Negara	Bidang HI dan PTK
			500.15.13.2	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan, Lembaga dan Negara	Bidang HI dan PTK
			500.15.13.3	Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Bidang HI dan PTK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						eksternal		dapat merugikan perorangan, Lembaga dan Negara	
			500.15.13.4	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Blasa/Terbuka	Terbuka untuk internal dan eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan, Lembaga dan Negara	Bidang HI dan PTK
		500.15.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.14.1	Pengupahan	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Terbuka	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
		500.15.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang HI dan PTK
			500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terbatas	Internal (Es.III) Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		500.15.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
			500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja					
			500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat					
			500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja					
		500.15.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak					
			500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan					
			500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak					
			500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral					
			500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak					
		500.15.18		Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
			500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan					
			500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran					
			500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja					
			500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya					
			500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3					
		500.15.19		Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan					
		500.15.20		Bina Penegakan Hukum					
			500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan					
			500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan					
			500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil					
			500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum					
		500.15.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
			500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K3					
			500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3					
			500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3					
			500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3					
		500.15.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
			500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
			500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
			500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
			500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
			500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
			500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
	500.16			PENANAMAN MODAL	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
		500.16.1		Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
		500.16.2		Perencanaan Penanaman Modal					
			500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya					
			500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur					
			500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan					
			500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur					
		500.16.3		Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
			500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha					
			500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyuluhan					
			500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha					
			500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha					
		500.16.4		Promosi Penanaman Modal					
			500.16.4.1	Pengembangan Promosi					
			500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi					
			500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri					
			500.16.4.4	Promosi Sektoral					
			500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah					
			500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
		500.16.5		Kerja Sama Penanaman Modal					
			500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral					
			500.16.5.2	Kerja Sama Regional					
			500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional					
		500.16.6		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
			500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal					
			500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	terbatas	terbatas	memiliki dampak tergangunya penyelengaraan tugas dan fungsi daerah	DPMPTSP
			500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	terbatas	terbatas	memiliki dampak tergangunya penyelengaraan tugas dan fungsi daerah	DPMPTSP
			500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	terbatas	terbatas	memiliki dampak tergangunya	DPMPTSP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penyelengaraan tugas dan fungsi daerah	
		500.16.7		Pelayanan Penanaman Modal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
			500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal,Publik	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	DPMPTSP
	500.17			PERTANAHAN					
		500.17.1		Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbuka/Biasa	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan	Dinas PRKPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lembaga dan Negara	
		500.17.2		Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
		500.17.3		Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Dinas PRKPP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum)		tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
		500.17.4		Sengketa Tanah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
			500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PRKPP
	500.18			TRANSMIGRASI	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		500.18.1		Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		500.18.2		Penyediaan Tanah Transmigrasi					
			500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah					
			500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah					
			500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan					
			500.18.2.4	Advokasi Pertanahan					
		500.18.3		Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Tenaga Kerja
			500.18.3.1	Penyiapan Lahan					
			500.18.3.2	Penyiapan Sarana					
			500.18.3.3	Penyiapan Prasarana					
			500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman					
		500.18.4		Fasilitasi Penempatan Transmigrasi					
			500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi					
			500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan					
			500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan					
			500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		500.18.5		Partisipasi Masyarakat					
			500.18.5.1	Promosi dan Motivasi					
			500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan					
			500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah					
			500.18.5.4	Pelayanan Investasi					
		500.18.6		Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi					
			500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan					
			500.18.6.2	Bina Sistem Informasi					
			500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan					
			500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat					
			500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan					
		500.18.7		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat					
			500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan					
			500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya					
			500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan					
			500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi					
		500.18.8		Pengembangan Usaha					
			500.18.8.1	Kewirausahaan					
			500.18.8.2	Produksi					
			500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran					
			500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan					
		500.18.9		Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan					
			500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana					
			500.18.9.2	Pengembangan Sarana					
			500.18.9.3	Pengembangan Prasarana					
			500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana					
		500.18.10		Penyerasian Lingkungan					
			500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan					
			500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan					
			500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi					
			500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan					
600				PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN					
	600.1			PEKERJAAN UMUM					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		600.1.1		Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.2		Penatagunaan Sumber Daya Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.2.2	Kelembagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.3		Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.1.3.2	Manajemen Mutu	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.4		Pengelolaan Sumber Daya Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.5		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.6		Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.8		Pembangunan Jalan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan *Drainage*	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.9		Preservasi Jalan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.9.2	Perencanaan Teknis	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.10		Pengelolaan Jembatan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.10.1	Standar dan Pedoman	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.1.10.2	Perencanaan Teknis	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.10.3	Teknik Jembatan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.12		Pengaturan Jalan Tol	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.14.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.14.5	Kelembagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.15.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Rahasia	Internal (Es. II), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.15.5	Kelembagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.16.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.16.5	Kelembagaan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Rahasia	Internal (Es. II), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman					
			600.1.17.1	Perencanaan Teknis					
			600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah					
			600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus					
			600.1.17.5	Kelembagaan					
			600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja					
		600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi					
	600.2			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PRKPP
		600.2.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
		600.2.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan					
			600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan					
			600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan					
			600.2.2.3	Kemitraan					
		600.2.3		Pola Pembiayaan Perumahan					
			600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum					
			600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan					
			600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan					
		600.2.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan					
			600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer					
			600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder					
			600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya					
			600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan					
			600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan					
		600.2.5		Perencanaan Penyediaan Perumahan					
			600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan					
			600.2.5.2	Analisa Teknik					
			600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian					
			600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan					
		600.2.6		Penyediaan Rumah Susun					
			600.2.6.1	Perencanaan Teknik					
			600.2.6.2	Penyediaan					
			600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan					
			600.2.6.4	Pengelolaan					
		600.2.7		Penyediaan Rumah Khusus					
			600.2.7.1	Perencanaan Teknik					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus					
			600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi					
			600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya					
			600.2.7.5	Perencanaan Teknik					
			600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni					
			600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan					
		600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial					
			600.2.8.1	Perencanaan Teknik					
			600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum					
			600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang					
			600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan					
		600.2.9		Investasi Infrastruktur					
			600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur					
			600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur					
			600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur					
			600.2.9.4	Pasar Infrastruktur					
		600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
			600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan					
			600.2.10.2	Kontrak Konstruksi					
			600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan					
			600.2.10.4	Manajemen Mutu					
		600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi					
			600.2.11.1	Kelembagaan					
			600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi					
			600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri					
			600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi					
		600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi					
			600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi					
			600.2.12.2	Penerapan Kompetensi					
			600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi					
			600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas					
		600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi					
			600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama					
			600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi					
		600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi					
			600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja					
			600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu					
		600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi					
			600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penerapan Teknologi Konstruksi					
			600.2.15.2	Pengembangan Materi					
			600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi					
		600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)					
			600.2.16.1	Antar Sektor					
			600.2.16.2	Antar Wilayah					
		600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis					
			600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis					
			600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antar kawasan Strategis					
		600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan					
			600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan					
			600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru					
			600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan					
			600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan					
			600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)					
		600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi					
	600.3			TATA RUANG (TATA KOTA)	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	BAPPEDA
		600.3.1		Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.3.2		Perencanaan					
			600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
			600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PUPR
			600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PUPR
			600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PUPR
		600.3.3		Pemanfaatan dan Pengendalian	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Internal (Es.	Tertutup	Memiliki dampak	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
			600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
		600.3.4		Pemetaan					
			600.3.4.1	Peta Dasar	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas PUPR
			600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PUPR
			600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PUPR
			600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas PUPR
	600.4			LINGKUNGAN HIDUP	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.1		Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Negara	
		600.4.2		Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.3		Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.4		Ekonomi Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.5		Dampak Lingkungan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas,	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Dinas Lingkungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						APH(Aparat Penegak Hukum)		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Hidup
			600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.6		Pemantauan dan Pengawasan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		600.4.7		Evaluasi dan Pengembangan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.8		Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.8.1	Pengembangan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.8.2	Pemanfaatan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas,	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Dinas Lingkungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						APH(Aparat Penegak Hukum)		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Hidup
			600.4.8.4	Keamanan Hayati	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.9		Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.9.2	Rawa	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.10		Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.10.1	Perangkat mitigasi	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Rahasia	Kepala Perangkat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Dinas Lingkungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas		penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Hidup
			600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.11		Adaptasi Perubahan Iklim	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak		Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
			600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.14		Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas,	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya	Dinas Lingkungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						APH(Aparat Penegak Hukum)		penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Hidup
			600.4.14.1	Pemantauan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.15		Pengelolaan Sampah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.15.1	Pembatasan sampah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.16		Hukum Administrasi Lingkungan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II),	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas		fungsi lembaga negara	
			600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.18		Penegakan hukum pidana lingkungan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600.4.18.1	Penyidikan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.19		Komunikasi Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
			600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan	Terbatas	Internal (Es III),	Tertutup	Memiliki dampak	Dinas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Lingkungan Hidup
			600.4.23.1	Pengelolaan Data	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.24		Kelembagaan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.25		Standarisasi dan teknologi	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perorangan Lembaga dan Negara	
			600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelanggaraan fungsi lembaga negara	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Dinas Lingkungan Hidup
		600.4.26		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
			600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Terbatas	Internal (Es III), Pengawas, APH(Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
700				PENGAWASAN	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
	700.1			PENGAWASAN INTERNAL	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan	Inspektorat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum)		tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
		700.1.1		Rencana Pengawasan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
			700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
			700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
			700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	Biasa / Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Inspektorat Daerah
			700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Biasa / Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Inspektorat Daerah
			700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Biasa / Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Inspektorat Daerah
		700.1.2		Pelaksanaan Pengawasan	Biasa / Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Inspektorat Daerah
			700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi Lembaga negara	Inspektorat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				memerlukan tindak lanjut (TL)		Hukum), Pengawas.			
			700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas.	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi Lembaga negara	Inspektorat Daerah
			700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas.	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi Lembaga negara	Inspektorat Daerah
			700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas.	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi Lembaga negara	Inspektorat Daerah
			700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas.	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi Lembaga negara	Inspektorat Daerah
			700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
			700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
			700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
			700.1.2.9	*Good Corporate Governance* (GCG)	Terbatas	Internal (Es.	Tertutup	Memiliki dampak	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Daerah
800				KEPEGAWAIAN	Terbatas	Internal (Es. III), Pengawas , APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	SekretariatBKP SDM
	800.1			SUMBER DAYA MANUSIA					
		800.1.1		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara					
			800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan	Terbatas	Pengguna internal dan eksternal	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan SDM
			800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Terbatas	Pengguna internal dan eksternal	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan SDM
			800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Pengguna internal dan eksternal	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan SDM
			800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	Terbatas	Pengguna internal dan eksternal	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan SDM
		800.1.2		Formasi dan Pengadaan Pegawai	Terbatas	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Pengadaan,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengumuman Kelulusan ASN		Eksternal		dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	Data dan Mutasi ASN
			800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.2.5	Pengangkatan ASN	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
		800.1.3		Mutasi Pegawai					
			800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
			800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
		800.1.4		Pengembangan Karir					
			800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/	Terbatas	Penentu	Tertutup	Apabila diketahui	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta		kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum		oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dan fungsi lembaga pemerintahan.	
		800.1.5		Kinerja Aparatur Sipil Negara					
			800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
		800.1.6		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN					
			800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			800.1.6.2	Disiplin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN,	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
			800.1.6.7	Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
		800.1.7		Bantuan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
		800.1.8		Status dan Kedudukan Pegawai					
			800.1.8.1	Status Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.8.3	Keberatan Pegawai	Terbatas	Penentu	Tertutup	Apabila diketahui	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum		oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
		800.1.9		Sistem Informasi Kepegawaian					
			800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
			800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
			800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN
		800.1.10		Pengawasan dan pengendalian					
			800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan	Terbatas	Penentu	Tertutup	Apabila diketahui	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pensiun ASN		kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum		oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
		800.1.11		Administrasi Pegawai					
			800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.2	Cuti Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
			800.1.11.3	Cuti Bersalin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.4	Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.6	Cuti Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara	Terbatas	Penentu kebijakan,	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang	Bidang Peningkatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum		tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								lembaga pemerintahan.	
			800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
		800.1.12		Kesejahteraan Pegawai					
			800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
			800.1.12.3	Tabungan Perumahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
			800.1.12.4	Bantuan Sosial	Terbatas	Penentu kebijakan,	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum		merugikan siapapun.	
			800.1.12.5	Pakaian Dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
			800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
			800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
			800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
			800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
			800.1.12.10	Rekam Medis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						hukum		pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
		800.1.13		Administrasi Perseorangan					
			800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan Sekretaris Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
			800.1.13.4	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
		800.1.14		Penilaian Kompetensi					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengembangan SDM
			800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengembangan SDM
	800.2			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
		800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
		800.2.2		Pendidikan dan Pelatihan					
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.2.4	Modul-modul diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.2.5	Panduan fasilitator	Biasa	Pengguna internal dan	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Bidang Pengembangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						eksternal		merugikan siapapun.	SDM
			800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengembangan SDM
		800.2.3		Widyaiswara					
			800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Biasa	Pengguna	Terbuka	Apabila diketahui	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						internal dan eksternal		oleh publik tidak merugikan siapapun.	Pengembangan SDM
			800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
		800.2.4		Penyelenggaraan Diklat					
			800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.4.5	Sistem informasi diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
			800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengembangan SDM
		800.2.5		Alumni	Biasa	Pengguna	Terbuka	Apabila diketahui	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						internal dan eksternal		oleh publik tidak merugikan siapapun.	Pengembangan SDM
900				KEUANGAN	Biasa/ Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga dan Negara	BPKAD
	900.1			KEUANGAN DAERAH					
		900.1.1		Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
		900.1.2		Penyusunan Anggaran	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
			900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
		900.1.3		Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.2	Pendapatan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.3	Belanja	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Bidang Perbendaharaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum)		Perangkat Daerah	
			900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.7	Daftar Gaji	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.8	Kartu Gaji	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan fungsi lembaga negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.3.10	Laporan Keuangan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
		900.1.4		Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (*Blue Book*)	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (*Green Book*)	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penegak Hukum), Pengawas			
			900.1.4.3	Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), dan dokumen sejenisnya	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.4	Dokumen *Loan Agremeent* (PHLN) Antara lain: *Draft Agreement, Legal Opinion*, Surat Menyurat dengan *Lender*	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (*Payment Advice*)	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana	Sangat	Kepala	Tertutup	Memiliki dampak	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dari Negara Donor) meliputi antara lain: *No Objection Letter* (NOL), *Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization* (WA),	Rahasia	Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas		terganggunya kedaulatan negara	Perbendaharaan
			900.1.4.10	*Staff Appraisal Report*	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.11	*Report* /Laporan	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.13	*Completion Report/Annual Report*	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
			900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/ Hibah Luar Negeri	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak Hukum), Pengawas	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan
		900.1.5		Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Sangat Rahasia	Kepala Perangkat Daerah (Es. II), APH (Aparat Penegak	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya kedaulatan negara	Bidang Perbendaharaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Hukum), Pengawas			
		900.1.6		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
			900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga atau Negara	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
			900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga atau Negara	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
			900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga atau Negara	BPKAD
			900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perorangan Lembaga atau Negara	Sekretariat
		900.1.7		Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat
			900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat
			900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan					
			900.1.7.3	Buku Rekening Bank	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/ Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perbendaharaan
		900.1.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
		900.1.9		Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD					
		900.1.10		Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaa n
			900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaa n
			900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/ Pergeseran/Revisinya	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
		900.1.11		Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
			900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
			900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
			900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		900.1.12		Anggaran Daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.12.1	Anggaran Daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
		900.1.13		Pendapatan dan Investasi Daerah					Bapenda
			900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	BAPENDA
			900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	BAPENDA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah					
			900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	BAPENDA
			900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	BAPENDA
			900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	BAPENDA
		900.1.14		Fasilitasi Dana Perimbangan					BPKAD
			900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam	Terbatas	Internal (Es.III),	Tertutup	Memiliki dampak	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam		Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Perbendaharaan
			900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
			900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan
		900.1.15		Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
			900.1.15.1	Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan	Terbatas	Internal (Es.III),	Tertutup	Memiliki dampak	Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah		Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)		terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
			900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Internal (Es.III), Pengawas, APH (Aparat Penegak Hukum)	Tertutup	Memiliki dampak terganggunya penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA